

ABSTRACT

The relationship between PT. Freeport Indonesia (PTFI) and the Indonesian Government has long been taking people's attention through the decades of their cooperation. In which, their relationship has climaxed once the agreement, Contract of Work (CoW), is in due date by December 2021 and they had to work onto a new agreement. Under Jokowi administration, a new agreement was made along with the changes from CoW into Special Mining Business License (IUPK), a license that was inseparable from pros and cons. Thus, this undergraduate thesis seeks to analyze the pros and cons of PTFI's IUPK and how they affect Indonesia's political and economic condition under the International Political Economy Theory. It's found that the pros and cons were reflected in the articles in the PTFI's IUPK and once it's under certain specific category (Jokowi's agenda, contractual certainty, automatic extension, environmentally friendly, environmental issue, mounting resource nationalism, adding value to the mineral goods, adding jobs, domestic demand), then the effects on Indonesia's political and economic condition become obvious. The political and economy area become intertwined in here as there are some category where the matter of political and economic couldn't be subfield to one another. This PTFI's IUPK shows that the new agreement is in favor of the Indonesian Government as there are more pros than cons with various argument concerning its effect on Indonesia's political and economic condition.

Keywords: Freeport, Indonesia, IUPK Political economy, pros and cons

ABSTRAK

Hubungan antara PT. Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerintah Indonesia selalu menarik perhatian masyarakat melalui kerjasama mereka yang telah terjalin bertahun-tahun. Dimana hubungan ini telah mencapai puncaknya saat kontrak mereka, yaitu Kontrak Karya (KK), yang semakin mendekati jatuh temponya pada Desember 2021 dan memaksa kedua belah pihak untuk memutuskan langkah selanjutnya. Dibawah pemerintahan Jokowi, sebuah perjanjian baru telah dibuat seiring dengan diubahnya Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan ijin ini jelas tidak bisa dipisahkan dari pro dan kontra. Karenanya di skripsi ini, penulis akan menganalisa mengenai pro dan kontra dari IUPK PTFI dan bagaimana mereka mempengaruhi kondisi politik dan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan teori International Political Economy. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa pro dan kontra dari ijin tersebut dapat dilihat di dalam setiap pasal yang ada dalam IUPK PTFI dan setelah dimasukan kedalam kategori yang spesifik, -(agenda Jokowi, kepastian kontrak, perpanjangan otomatis, isu lingkungan, meningkatnya nasionalisme sumber daya, bertambahnya nilai hasil tambang, bertambahnya jumlah lapangan kerja dan permintaan domestik),- maka pengaruh nya pada kondisi politik dan ekonomi di Indonesia menjadi jelas. Pada akhirnya, IUPK PTFI telah menunjukan kalau perjanjian ini ada dalam kepentingan Pemerintah Indonesia karena ada lebih banyak pro daripada kontra dengan berbagai argument mengenai efeknya pada kondisi politik dan ekonomi Indonesia.

Kata kunci : Freeport, Indonesia, IUPK, Political economy, pros and cons